BAWASLU KOTA YOGYA AWASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Sisa Waktu Sepekan, Pendaftar Caleg Berpotensi Berjubel

YOGYA (KR) - Sejak dibuka pada 1 Mei 2023 lalu, hingga kemarin belum ada partai politik (parpol) di Kota Yogya yang mendaftarkan bakal calon legislatif (caleg). Dengan sisa waktu tinggal sepekan, maka pendaftar berpotensi berjubel pada hari jelang penutupan.

Total ada 18 parpol peserta Pemilu 2024 yang memiliki kesempatan untuk mendaftarkan bakal calegnya dari tingkat daerah hingga pusat. Jika seluruh parpol tersebut mengambil kesempatan untuk kontestasi berebut kursi di DPRD Kota Yogya maka dalam sehari hingga 14 Mei 2023 mendatang bisa lebih dari dua parpol yang mengumpulkan berkas pendaftaran ke KPU Kota Yogya. "Sampai sekarang belum ada yang mengajukan. Akan kami update kembali apakah sudah ada kepastian dari tiap parpol untuk mendaftarkan bakal calegnya," urai Komisioner KPU Kota Yogya Divisi Teknis Penyelenggaraan Erizal, Senin (8/5).

Menurut Erizal, sesuai ketentuan pendaftaran bakal caleg hanya bisa dilakukan melalui parpol peserta pemilu. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi Silon. Selain itu, pengurus inti parpol juga harus menyerahkan berkasnya secara offline ke KPU Kota Yogya. Waktu penyerahan berkas juga sudah diatur yakni Senin hingga Sabtu pada pukul 08.00 - 16.00 WIB. Khusus di hari terakhir pada Minggu (14/5) dilayani hingga pukul 23.59 WIB.

KPU Kota Yogya juga membuka layanan helpdesk yang dapat dimanfaatkan oleh parpol peserta pemilu. Terutama untuk penjelasan informasi terkait pengajuan bakal caleg DPRD Kota Yogya. Total ada 40 kursi di DPRD Kota Yogya yang terbagi dalam lima daerah pemilihan (dapil). "Layanan helpdesk bisa diakses dengan datang langsung ke sekretariat maupun melalui sambungan telepon atau email yang telah kami sebarkan ke masing-masing parpol," jelasnya.

Selain itu, tiap parpol bisa mendaftarkan maksimal sejumlah kursi di masing-masing dapil. Satu orang bakal caleg juga hanya bisa diajukan di satu dapil. Jika seluruh parpol peserta Pemilu 2024 mendaftarkan bakal calegnya secara maksimal, maka potensi yang didaftarkan mencapai 720 orang. Petugas KPU Kota Yogya harus memeriksa kelengkapan berkas bagi tiap bakal caleg yang didaftarkan tersebut.

Sementara Komisioner Bawaslu Kota Yogya Noor Harsya Aryo Samudro, mengungkapkan regulasi pendaftaran bakal caleg tertuang melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023. Jajarannya sudah berkomitmen untuk mengawasi kelengkapan administrasi. Baik terhadap bakal caleg yang didaftarkan maupun mekanisme yang dijalankan oleh KPU Kota Yogya. Pihaknya pun telah memberikan imbauan kepada KPU maupun parpol agar menjalankan tahapan sesuai aturan dan tepat waktu.

"Pengawasan kami misalnya pada pelayanan yang tidak setara atau kurang profesional. Terutama pada ketepatan waktu dan tepat administrasi. Sisa waktu kan tinggal seminggu lagi namun belum ada parpol yang mendaftar. Sehingga perlu kita kawal agar potensi pelanggaran bisa dicegah oleh KPU maupun parpol," urai Harsya. **(Dhi)-d**

Mal Pelayanan Publik Kota Yogya Diakses 85.396 Orang

KR-Ardhi Wahdan

Antrian masyarakat yang hendak mengakses layanan di MPP Kota Yogya, kemarin.

YOGYA (KR) - Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogya mendapatkan atensi yang cukup tinggi dari masyarakat. Dalam setahun sejak dioperasikan, total sedikitnya ada 85.396 orang yang mengakses layanan satu pintu di komplek Balaikota Yogya tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogya Budi Santoso, menjelaskan MPP merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendekatkan, menyelaraskan, dan mensinergikan pelayanan sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 23 Tahun 2017. "Kalau secara nasional saat ini sudah terdapat 550 MPP, dan di Kota Yogya merupakan MPP yang ke-70," jelasnya, Senin (8/5).

MPP Kota Yogya pertama kali dilakukan soft launching pada 3 Juni 2021 lalu. Jumlah layanan yang diberikan ke masyarakat saat ini masih terbatas karena untuk melihat respons serta evaluasi. Kemudian pada 6 Oktober 2022 resmi diluncurkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) yakni Abdullah Azwar Anas.

Budi mengaku animo masyarakat dinilai cukup tinggi ketika layanan publik mampu diakses dalam satu tempat. Selama tahun 2022 lalu pihaknya mencatat ada 85.396 orang yang berkunjung atau mengakses layanan di MPP Kota Yogya. Dari tingkat kunjungan tersebut terdapat 19.580 izin yang berhasil diterbitkan. "Secara umum terdapat 64 jenis layanan perizinan yang bisa diakses di MPP Kota Yogya. Selain itu masih ada 55 layanan non perizinan serta enam layanan komersial seperti perbankan, UMKM serta kedai kopi," imbuhnya.

Selain memberikan akses atas layanan publik yang dikelola Pemkot Yogya, MPP Kota Yogya juga terintegrasi dengan sejumlah layanan vertikal. Bahkan pada awal tahun layanan diperbanyak dengan menambah tujuh layanan dari instansi vertikal. Di antaranya ialah Imigrasi Kelas I, Pengadilan Agama, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kejaksaan Negeri, Direktorat Jenderal Perumahan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. "Memasuki tahun yang kedua ini, MPP Kota Yogya bersama-sama semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat dengan menambah tujuh layanan dari instansi vertikal," imbuh Budi. **(Dhi)-d**

PENUHI DESAKAN MASYARAKAT BAWAH

GKR Hemas Mendaftar Sebagai Anggota DPD RI

KR-Devid Permana

GKR Hemas (kiri) menerima berita acara pendaftaran dari Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan.

YOGYA (KR) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sekaligus Permaisuri Kraton Yogyakarta, GKR Hemas kembali mendaftar sebagai Calon Anggota DPD RI untuk periode 2024-2029. Ketika mendaftar ke KPU DIY, Senin (8/5), GKR Hemas didampingi oleh tim pendukungnya yaitu Gatot Saptadi, Faraz Umaya, dan Syahbenol Hasibuan.

Menurut Hemas, pencalonan kembali dirinya sebagai Anggota DPD RI ini untuk memenuhi desakan dari sebagian besar masyarakat bawah di Yogyakarta, yang selalu ditemuinya semasa kegiatan reses. Pengalamannya selama di DPD RI dan juga sebagai politisi perempuan memang menuntut dia untuk selalu turun ke bawah.

Selama 4 tahun terakhir, lebih dari 150 kalurahan di DIY yang didatanginya secara langsung untuk bertemu lurah dan masyarakat. Banyak masukan yang dia terima, termasuk permohonan agar kembali menjadi wakil rakyat dan wakil daerah. Desakan ini sudah muncul sejak 2 tahun terakhir.

"Semua persyaratan mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024 sudah diterima dan diperiksa oleh Komisioner KPU DIY dan tidak ada masalah, Alhamdulillah. Saya akan maju lagi sebagai Calon Anggota DPD RI pada Pemilu 2024," kata Hemas kepada wartawan usai pendaftaran. Pencalonan Hemas sendiri sudah mendapatkan restu dari Raja Kasultanan Yogyakarta (suaminya) yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Hemas menyampaikan bahwa banyak Undang-Undang (UU) yang telah berhasil diselesaikan dalam menjalankan tugasnya di Jakarta, termasuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dia juga selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY agar berbagai UU dan regulasi di tingkat pusat tidak sampai merugikan rakyat Yogyakarta.

"Dengan melihat secara langsung keadaan masyarakat di sudut-sudut dan seluruh penjuru Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas saya masih banyak yang harus saya perjuangan sebagai Anggota DPD RI untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat DIY," ujarnya.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengatakan, tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD DIY dan pendaftaran bakal calon anggota DPD RI berlangsung 1-14 Mei 2023. "Calon atas nama GKR Hemas, persyaratan pendaftaran pencalonannya sudah memenuhi syarat. Terkait lolos tidaknya untuk semua calon baik itu partai politik maupun DPD, kami harus melakukan verifikasi administrasi yang akan kami lakukan mulai tanggal 15 Mei 2023," katanya. **(Dev)-d**

FEKDI 2023 RESMI DIBUKA

DIY Patut Optimis Miliki Potensi Ekonomi Digital Cukup Besar

YOGYA (KR) - Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 yang telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan resmi dibuka. FEKDI 2023 menjadi ajang etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perekonomian didukung Kementerian/Lembaga (K/L), 4 Bank Sentral negara ASEAN dan industri guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

FEKDI 2023 bertema "Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth" ini merupakan bagian dari rangkaian acara Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 pada jalur keuangan. Kegiatan ini dibuka secara resmi Presiden Joko Widodo dan diselenggarakan selama 3 hari, mulai 8 sampai 10 Mei 2023 di Jakarta Convention Centre yang diawali soft opening dalam bentuk penguatan eksperimentasi layanan digital pada 7 Mei 2023.

Pelaksanaan FEKDI merupakan salah satu wujud komitmen BI memperluas digitalisasi sistem pembayaran guna memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi digital melalui sinergi sistem pembayaran digital dengan berbagai program Pemerintah dan otoritas terkait, serta pengembangan inovasi berkolaborasi dengan industri. Momentum sinergi dan kolaborasi FEKDI 2023 juga diperkuat dengan peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah dan QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia.

KR-Istimewa

Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi sejumlah pejabat berfoto bersama usai meluncurkan KKI dan Implementasi QRIS Antarnegara Indonesia -Malaysia menandai Pembukaan FEKDI 2023

Presiden Joko Widodo menyampaikan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia bisa dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, dengan pangsa pasar sekitar 40% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN. Indonesia menduduki peringkat ke-6 negara yang memiliki 2.400 startup terbesar di dunia dengan penetrasi internet 76,8%, serta nilai ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai USD 130 miliar pada 2025. Jumlah ini akan terus bertumbuh mencapai USD 315 miliar pada 2030 nantinya.

"Kunci tumbuh dan berkembangnya ekonomi digital Indonesia adalah inovasi dan kepercayaan, Inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan yang handal dan perlindungan konsumen atau masyarakat yang baik," ucapnya.

Presiden Jokowi menegaskan dalam pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS Antarnegara juga harus diperkuat. Guna mendukung perekonomian inklusi di kawasan, serta menjadi bagian penting dari kekuatan Indonesia di ASEAN pada tahun ini.

"Saya harap QRIS Antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI DIY Harso Hutomo mengatakan DIY memiliki potensi ekonomi digital yang cukup besar. Transaksi digital DIY terus meningkat, antara lain transaksi e-commerce sebesar Rp 8,7 triliun serta nominal transaksi QRIS Rp 254 miliar pada 2022.

"Tidak hanya itu, DIY juga memiliki banyak inisiatif dan inovasi untuk mendukung ekonomi keuangan digital, seperti inovasi perluasan pembayaran pajak dan retribusi nontunai yang merambah marketplace, ekosistem Pasar S.I.A.P QRIS, Visiting Jogja di bidang pariwisata, SiBakul Hub untuk e-commerce UMKM, perluasan QRIS di rumah ibadah dan sebagainya," paparnya dalam silaturahmi sekaligus pembukaan FEKDI 2023 di Gedung Heritage Kantor Perwakilan BI DIY, Senin (8/5).

Harso menyatakan upaya memperluas ekosistem ekonomi keuangan digital terus dilakukan dan diakselerasi BI pada 2023. Upaya tersebut tidak bisa dilakukan sendiri karena membutuhkan konsistensi, dukungan dan sinergi dari kabupaten dan kota serta berbagai sektor utama ekonomi DIY yakni pariwisata, UMKM, dan pendidikan.

"DIY patut optimis dengan adanya peluncuran perluasan sistem keuangan digital ini. Dari data BPS, Malaysia merupakan penyumbang wisatawan asing terbesar dengan share 50% dari total turis yang datang ke DIY selama 2023. Harapannya, bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi UMKM dan pariwisata DIY serta perluasan dan inklusivitas digitalisasi sehingga berdampak lebih besar terhadap meningkatnya kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di DIY.

Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Wiyos Santoso mengungkapkan salah satu sumber pendapatan tertinggi di DIY dari Pajak Kendaraan Bermotor yang penerimaan sudah menggunakan sistem digital, baik dengan kanal mobile banking, dompet digital dan e-commerce. Pesatnya perubahan metode transaksi pembayaran dari tunai menjadi nontunai menyebabkan digital payment menjadi kebutuhan, sehingga Pemda DIY mendigitalisasi seluruh transaksi perpajakan yang diterima.

"Pemda DIY dalam hal ini senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap inovasi ekonomi digital guna membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan, terutama di bidang pendidikan, transportasi, kesehatan dan pariwisata, baik untuk kebutuhan pribadi, bisnis, maupun sosial. Solusi pembayaran digital tersebut juga diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah di DIY," pungkasnya **(Ira)**

KR-Fira Nurfiani

Pj. Sekda DIY Wiyos Santoso memberikan sambutan dan komitmen digitalisasi dalam ajang silaturahmi dan pembukaan FEKDI 2023 di Gedung Heritage Kantor Perwakilan BI DIY

KR-Fira Nurfiani

Deputi Kepala Perwakilan BI DIY Harso Hutomo menyampaikan sambutan dalam ajang silaturahmi dan pembukaan FEKDI 2023 di Gedung Heritage Kantor Perwakilan BI DIY